

Pendapatan Asli Daerah- Tambang Nikel Vale Indonesia di Sorowako Sumbang Rp 600 Miliar ke PAD Luwu Timur



Sumber gambar:

<https://kumparan.com/kumparanbisnis/tambang-nikel-vale-indonesia-di-sorowako-sumbang-rp-600-miliar-ke-pad-luwu-timur-23GFmWDkAgF>

Tambang nikel PT Vale Indonesia Tbk (INCO) di Sorowako telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Penerimaan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Luwu Timur. Bupati Luwu Timur Budiman Hakim mengatakan kontribusi tersebut mencapai sekitar Rp 600 miliar setiap tahunnya.

"Kontribusi dari Sorowako sangat cukup, sekitar Rp 600 miliar. Ini memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat," kata Budiman di Tambang Nikel Vale Indonesia Sorowako, Minggu (4/8).

Sementara itu, Pj Gubernur Sulawesi Selatan Zudan Arif Fakrullah mengatakan Vale Indonesia juga berperan dalam menjaga ekosistem lingkungan di tengah stigma negatif dunia pertambangan.

"Kami melihat bahwa setelah 56 tahun beroperasi, ekosistem di Danau Matano (area tambang Sorowako) tetap terjaga dengan baik. Ini menjadi contoh best practices dalam dunia pertambangan di Indonesia," ujar Zudan.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Zudan juga menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat melalui sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. "Kami berdiskusi panjang dengan Pak Budiman mengenai aspek pemberdayaan masyarakat yang bertumpu pada sektor-sektor ini. Dunia pertambangan tidak harus identik dengan kerusakan lingkungan. Sorowako adalah contoh model yang perlu dikembangkan untuk Indonesia," ungkap Zudan.

PJ Gubernur Sulawesi Selatan Zudan Arif Fakrullah bersama dengan CEO Vale Indonesia Febriany Eddy di Tambang Nikel Sorowako, Minggu (4/8/2024). Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan

Zudan juga menyoroti pentingnya pengelolaan Bandar Udara Sorowako yang sebelumnya dialihkan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

"Ada beberapa aspek besar yang harus dibahas, termasuk SDM, sarana, prasarana, dan pendanaan. Prinsipnya, kami mendukung apa yang terbaik untuk Vale Indonesia, Luwu Timur, dan Sulawesi Selatan. Tata kelolanya harus yang terbaik dan berkelanjutan," kata Zudan.

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, Senin (29/7), INCO mengantongi laba bersih USD 37,28 juta atau setara Rp 607,2 miliar (kurs Rp 16.286 per USD). Angka ini anjlok 82,06 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu USD 207,80 juta atau Rp 3,38 triliun.

Merosotnya laba bersih ini seiring dengan penurunan pendapatan INCO. Pada semester I 2024, perusahaan meraup pendapatan USD 478,75 juta (setara Rp 7,79 triliun), anjlok 27,34 persen dibandingkan pendapatan semester I 2023 senilai USD 658,96 juta (setara Rp 10,73 triliun).

Reklamasi lahan bekas tambang PT Vale Indonesia di Blok Sorowako. Foto: Angga Sukmawijaya/kumparan

Meski mengalami penurunan laba bersih dan pendapatan, volume produksi bijih nikel sepanjang semester I 2024 naik menjadi 34.774 metrik ton dibanding periode sama pada tahun sebelumnya 33.691 metrik ton. Sejalan dengan kenaikan produksi, penjualan nikel matte juga naik menjadi 35.680 per akhir Juni 2024 dibandingkan tahun sebelumnya 33.221 ton.

Harga realisasi rata-rata bijih nikel turut menjadi beban perseroan karena mengalami penurunan sepanjang semester I 2024 sekitar USD 13.416 per ton, dibanding periode sama pada tahun sebelumnya USD 19.836 per ton.

“Meskipun kondisi pasar yang tidak menentu, kami tetap berkomitmen untuk mengoptimalkan kapasitas produksi, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi biaya,” tulis CEO dan Presiden Direktur Vale Indonesia Febriany Eddy melalui keterangan tertulis, Senin (29/7).

Febriany optimistis perusahaan akan terus meningkatkan produksi dan efisiensi biaya pada paruh semester kedua. Pihaknya telah menyusun strategi bisnis untuk mengintegrasikan operasional usaha.

"Memasuki semester kedua tahun ini, kami akan terus proaktif mendorong inisiatif penghematan biaya. Untuk memastikan biaya tunai per unit tetap kompetitif dalam upaya menghasilkan margin yang sehat," katanya.

Terkait dengan hal tersebut, Legislator Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) meminta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mundur dari jabatannya jika tidak mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Desakan itu usai KPK menyoroati postur APBD dan PAD Bone.

"Realisasi PAD kita sangat minim, baru di kisaran 39,50%. Untuk menormalkan APBD genjot PAD, jadi kepala OPD yang tidak mampu capai target silakan mundur," ujar Anggota Komisi I DPRD Bone Fahri Rusli kepada **detikSulsel**, Rabu (26/4/2024).

Fahri mengatakan, realisasi PAD Bone hingga Juni hanya Rp 113,648 miliar atau baru 39,50% dari target Rp 287,720 miliar. Dia pun menyebut Pemkab Bone sebaiknya melakukan evaluasi kepada OPD yang tidak bisa memberikan sumbangsi dalam PAD. Sebab, pengaruh postur di APBD tahun 2024 ada masalah diakibatkan perkara piutang di tahun 2023.

"Harus ada evaluasi kalau PAD tidak capai target. Mending Pemkab fokus kejar yang namanya PAD, target PAD yang harus coba dinaikkan dan dimaksimalkan," katanya.

Ketua Bapemperda DPRD Bone itu menerangkan, APBD Bone tahun 2024 tidak sehat disebabkan membengkaknya belanja pegawai. Ada kenaikan belanja pegawai sekitar Rp 200 miliar.

"Yang bermasalah ini belanja pegawai karena adanya penerimaan PPPK, akhirnya tidak mampu dipenuhi oleh Pemkab Bone. Tahun 2020/2021 belanja pegawai di angka Rp 1,2 triliun, di tahun 2023/2024 membengkak sekitar Rp 1,4 triliun," terangnya.

Di sisi lain, dia menegaskan pikir anggota DPRD tidak menjadi beban dalam APBD. Apalagi pikir ini langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Pada dasarnya pikir ini merupakan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui reses dan diatur dalam regulasi. Pokir ini yang dijalankan anggota DPRD untuk memenuhi kepentingan masyarakat dan tidak mengganggu postur APBD," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, KPK menyoroti postur APBD 2024 Pemkab Bone yang dinilai tidak sehat hingga realisasi PAD tidak maksimal. Kondisi ini dianggap berdampak pada kemampuan keuangan daerah, khususnya dalam menuntaskan cicilan utang dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Hal itu mengemuka dalam rapat koordinasi terintegrasi 2024 wilayah Sulsel di kantor Bupati Bone, Senin (24/6). Pertemuan itu dihadiri Kasatgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Wilayah IV KPK RI, Tri Budi Rochmanto.

"Monitoring evaluasi beberapa hal misalkan kita dorong supaya postur APBD-nya sehat. Tadi kita sepakat dengan Pj Bupati Bone APBD harus berdampak kepada masyarakat," ujar Tri kepada **detikSulsel** usai pertemuan, Senin (24/6).

Tri mengatakan, Pemkab Bone maupun DPRD Bone harus bersinergi untuk menstabilkan postur APBD. Apalagi pemerintah punya beban untuk menuntaskan utang.

"Dengan adanya kewajiban yang cukup besar untuk cicilan dana PEN dan PAD yang belum maksimal sehingga harus sama-sama berpikir. Ya kalau perlu DPRD-nya puasa dulu tidak ada pikir," tuturnya.

Sumber Berita:

1. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/tambang-nikel-vale-indonesia-di-sorowako-sumbang-rp-600-miliar-ke-pad-luwu-timur-23GFmWDkAgF>
2. <https://www.detik.com/sulsel/watampone/d-7410143/pad-bone-disorot-kpk-legislator-desak-kepala-opd-tak-capai-target-mundur>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan:

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 huruf a meliputi:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.